

**PELAKSANAAN *HUMAN RELATIONS* DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DESA KALISARI KECAMATAN KRADENAN  
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016**  
(Studi Kasus di Desa Kalisari Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan)



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I  
pada Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Oleh:

**EKO NOVI KRISTYANTO**

**NIM: A 220110007**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2017**

## HALAMAN PERSETUJUAN

**PELAKSANAAN *HUMAN RELATIONS* DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DESA KALISARI KECAMATAN KRADENAN  
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016**  
(Studi Kasus di Desa Kalisari Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan)

### PUBLIKASI ILMIAH

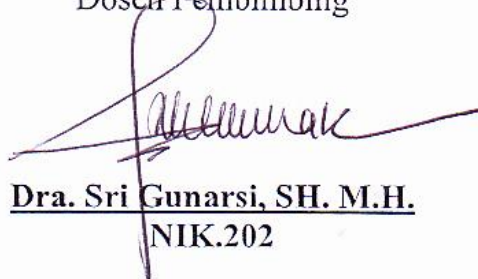
Diajukan Oleh:

**EKO NOVI KRISTYANTO**

**NIM: A 220110007**

Artikel Publikasi ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing skripsi  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta  
untuk dipertanggung jawabkan di hadapan tim penguji skripsi.

Surakarta, 7 April 2017  
Dosen Pembimbing



**Dra. Sri Gunarsi, SH. M.H.**  
**NIK.202**

## HALAMAN PENGESAHAN

### PELAKSANAAN *HUMAN RELATIONS* DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA KALISARI KECAMATAN KRADENAN KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

EKO NOVI KRISTYANTO  
A220110007

Telah dipertahankan di Depan Penguji Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan  
Universitas Muhammadiyah Surakarta Pada Hari Surakarta, rabu 19 April 2017  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:


1. Dra. Sri Gunarsi, SH. M.H.
2. Prof. Dr. Bambang Sumardjoko, M.pd
3. Dra. Sri Arfiah.SH.,M.pd



Surakarta,  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Dekan,

  
**Prof. Dr. Harun Joko Prayitno**  
NIP. 19658428 199303 1 001

## PERNYATAAN

Dengan ini, penulis menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi. Sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan di atas, maka penulis bertanggung jawab sepenuhnya.

Surakarta, 7 April 2017

Penulis



EKO NOVI KRISTYANTO  
NIM: A 220110007

**PELAKSANAAN *HUMAN RELATIONS* DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DESA KALISARI KECAMATAN KRADENAN  
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016**

**ABSTRAK**

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan pelaksanaan *human relations* yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kalisari, mendiskripsikan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan *human relation* di Desa Kalisari dan mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah Desa Kalisari dalam mengatasi hambatan pelaksanaan *human relations*.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, dengan strategi studi kasus. Teknik pengumpulan datanya dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan datanya menggunakan triangulasi sumber data dan teknik pengumpulan data. Analisis datanya menggunakan teknik analisis interaktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan *human relations* yang berlaku di Desa Kalisari Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan adalah terjalinnya hubungan yang cukup baik antara kepala desa dengan jajaran di bawahnya maupun jajaran dengan kepala desa dan juga hubungan antara kepala desa beserta jajarannya dengan masyarakat desa demikian juga sebaliknya, 2) Kendala dalam pelaksanaan *human relations* yang berlaku di Desa Kalisari Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan sampai saat ini adalah adanya perbedaan sumber daya manusia yang ada pada pegawai-pegawai dan atau petugas di desa tersebut. Kendala tersebut disebabkan faktor usia pada pegawai yang sudah mendekati masa pensiun, sehingga kesulitan mengikuti perkembangan zaman dan tuntutan dan pemerintah pusat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, 3) Solusi dalam mengatasi kendala-kendala yang terjadi adalah dengan melakukan koordinasi dan konsolidasi secara terus menerus untuk mengadakan pengawasan bersama-sama. Pengawasan dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi kesalahan-kesalahan yang sangat mungkin dilakukan oleh petugas desa.

**Kata Kunci:** *Human relations*, pemerintah desa, kepala desa.

**ABSTRACT**

*The general objective of this research is to implementation of human relations that is conducted by the Government Kalisari Village, description barriers faced in implementation human relation in the village of Kalisari and knowing the efforts made the Government the village Kalisari in overcoming barriers to implementation of human relations.*

*This research is qualitative, with this type of research strategy case studies. Data gathering techniques with observation, interviews, and documentation. The validity of the data using triangulation data sources and data collection techniques. The analysis of the data using interactive analysis techniques.*

*The results of this research show that: 1) exercise of human relations that occurred in the village of Kradenan Subdistrict Kalisari Grobogan is a fairly good relations between the head of the village with the ranks below as well as the alignment with the village chief and also the relationship between the head of the village and its range with the villagers and vice versa, 2) Constraints in the implementation of human relations that occurred in the village of Kradenan sub district of Grobogan Kalisari to date is the existence of a difference human resources that exist at the officers and officers in the village of or. The constraints due to age factor on employee who was nearing retirement, so the difficulty of keeping track of the times and the demands of the Central Government and to improve services to the community, 3) solutions in overcoming constraints that happened is to do coordination and consolidation of continually to hold oversight together. Supervision is carried out in an effort to reduce the errors that are very likely to be carried out by officers of the village.*

*Keywords: Human relations, the Government of the village, the village chief.*

## **1. PENDAHULUAN**

Desa merupakan suatu organisasi pemerintah yang secara politis memiliki kewewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau kelompoknya. Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.

Posisi desa memiliki peranan penting dalam menunjang kesuksesan pemerintah nasional secara luas, bahkan desa merupakan garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas dibidang pelayanan publik.

Menurut Tierney dan James T. Minor (2004:93) dalam jurnal *A Cultural Perspective on Communication and Governnace* menyatakan “*Communication is not a cure-all for thr current woes that confront those involved in shared governance, but a concern for organizational reform must be balanced with an awareness of the communicative codes within the workplace.*” Komunikasi adalah

tidak obat-semua untuk saat ini thr kesengsaraan yang menghadapi mereka yang terlibat dalam pemerintahan bersama, tetapi kekhawatiran untuk reformasi organisasi harus diseimbangkan dengan kesadaran kode komunikatif dalam tempat kerja.

Hampir semua aparat pemerintahan paham tentang komunikasi namun tidak semuanya memahami bagaimana berkomunikasi secara efektif, khususnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan melakukan fungsi-fungsi utama pemerintahan yang mencakup pelayanan, pemberdayaan, dan bersama-sama masyarakat mencapai kebahagiaan yang sebesar-besarnya tanpa merugikan pihak lain secara ilegal (Hasan, 2005:114).

*Human Relations* merupakan hal yang penting dalam kesuksesan suatu kegiatan apapun, terutama dalam suatu organisasi pemerintahan ataupun pekerjaan. Hubungan antara manusia yang baik akan menciptakan suatu keharmonisan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Ditinjau dari ilmu komunikasi, “hubungan manusiawi itu termasuk kedalam komunikasi antarpersona (interpersonal communication) sebab berlangsung pada umumnya antara dua orang secara dialogis” (Efendy, 2015: 138). Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti ingin melakukan kajian tentang “Pelaksanaan *Human Relations* dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Kalisari Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan Tahun 2016”.

## **2. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, karena berusaha untuk mendiskripsikan suatu kejadian atau fenomena yang ada di lingkungan desa berdasarkan asumsi dan peristiwa yang terjadi. Menurut Nasehudin dan Gozali (2012: 57), penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menjelaskan sesuatu yang menjadi sasaran secara mendetail. Penelitian ini menggunakan data kualitatif dibuktikan dengan adanya data yang diperlukan adalah tilusan, foto dan dokumen yang lainnya mengenai Pelaksanaan *human relations* di Desa Kalisari Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan. Sumber data digunakan dalam penelitian kualitatif adalah orang (*person*), tempat (*place*),

simbol (*paper*), arsip atau dokumen dan peristiwa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Instrumen penelitian ini adalah peneliti sendiri. Penelitian ini menggunakan dua macam triangulasi, yang pertama triangulasi sumber data meliputi informasi dari informan, tempat dan peristiwa, serta dokumen atau arsip yang memuat catatan yang berkaitan dengan data yang dimaksudkan.

Kedua, triangulasi teknik atau metode pengumpulan data yang berasal dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan model analisis interaktif. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui pengamatan serta wawancara secara langsung, maka analisis data yang peneliti gunakan adalah model interaktif baik dalam pengumpulan data, reduksi data, sampai pada penarikan kesimpulan.

### **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Bentuk Pelaksanaan *Human Relations***

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang telah dipaparkan di atas, diketahui bahwa dalam hal bentuk dan cara komunikasi, mengatakan bahwa pelaksanaan *human relations* dilakukan dalam bentuk lisan dan tertulis. Bentuk lisan dilakukan dengan cara turun langsung dan mengunjungi warga serta menyampaikan secara langsung kebijakan pemerintah desa. Sedangkan bentuk tertulis bisa dilakukan dengan dan melalui surat yang ditujukan kepada jajaran yang berada di bawah kendali kepala desa.

Pelaksanaan *human relations* dalam pemerintah desa Kalisari adalah *human relations* yang di satu pihak telah menunjukkan pelaksanaan relasi personal antar aparat pemerintah desa dengan jajarannya dan antara aparat pemerintah desa dengan sesama warga masyarakat termasuk juga antara warga masyarakat dengan pemerintah sehingga membantu proses pembangunan masyarakat. Pelaksanaan *human relations* selama ini telah berjalan dengan baik dan tidak ada persoalan yang berarti karena semua sesuai dengan arahan dan masing-masing petugas memahami dengan segala kelebihan dan kekurangannya.



Hasil wawancara dengan masyarakat desa Kalisari dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan hubungan kemasyarakatan yang dilakukan oleh aparat desa selama ini sudah berjalan dengan baik. Kepala desa selalu memberikan wewenang kepada sekretaris desa apabila berhalangan agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.

Apa yang terjadi dalam hal *human relations* di desa Kalisari ini jika dikaitkan dengan teori *human relations* yang dikatakan The Liang Gie dapat dikatakan telah menunjukkan model *human relations* yang benar dalam pemerintahan. Menurut The Liang Gie, *human relations* yang baik adalah adanya suatu interaksi, bukan sekedar relasi atau hubungan yang pasif, melainkan suatu aktivitas yang merupakan ‘action oriented’ untuk mengembangkan hasil yang lebih produktif dan memuaskan. *Human Relations* adalah suatu hubungan antar manusia yang lebih dan sekedar hubungan manusia, melainkan hubungan manusiawi yang tidak hanya mementingkan aspek komunikasi, tetapi juga aspek psikologis dan kepuasan.

### **3.2 Faktor Penghambat Pelaksanaan *Human Relations***

Berdasarkan lingkup *human relations* terdapat dua pengertian yakni *human relations* dalam arti luas dan *human relations* dalam arti sempit. *Human relations* dalam arti luas dapat terjadi di mana saja, seperti di rumah, di jalanan, dalam kendaraan, dan lain-lain di mana setiap dapat melakukannya dengan komunikasi yang baik sehingga saling memuaskan individu yang terlibat di dalamnya. Sedangkan *human relation* dalam arti sempit misalnya komunikasi keorganisasian antara orang perorangan dalam struktur organisasi formal, perusahaan, termasuk komunikasi antara mahasiswa dengan warga masyarakat.

Dalam konteks pemerintahan, relasi *human relations* dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat memberikan dampak yang besar bagi para aparatur pemerintahan. Jika aparatur pemerintahan dapat mempraktekkan *human relations* dengan baik, maka akan sangat memberikan pengaruh kepada kualitas kebijakan dan hasil yang baik bagi kehidupan masyarakat. Dalam lingkup pemerintahan desa, *human relations* bisa membantu aparat pemerintah desa dalam mengembangkan desa dan mensejahterakan masyarakat. sebagaimana diketahui

bahwa menurut Undang – Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, desa diartikan sebagai “desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.” Pasal 1 angka (2) menjelaskan bahwa “Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Kendala dan pelaksanaan *human relations* dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Kalisari yang dijumpai adalah adanya perbedaan sumber daya manusia dan aparatur pemerintah desa. Faktor usia juga menjadi kendala tersendiri karena usia yang sudah mendekati pension bagi seorang kades ataupun kaur, namun dalam kenyataannya untuk mencari pengganti petugas yang memasuki masa pensiun tersebut mengalami kesulitan. Persoalan tersebut disebabkan karena banyak dijumpai masyarakat Desa Kalisari dengan usia produktif maupun non produktif keluar desa untuk merantau dan mencari sumber penghidupan di luar daerah. Pembangunan – pembangunan desa sebagai sarana pemerintah pusat untuk mengembangkan desa agar menjadi desa yang maju belum sepenuhnya dapat terealisasi dengan baik. Selain itu alokasi dana desa sampai saat ini masih diperuntukkan pembangunan yang bersifat infrastruktur seperti pembangunan jalan desa dan belum dalam pembangunan sektor ekonomi desa.

Dalam lingkup hubungan antar lembaga desa, misalnya antara kepala desa dengan sekretaris desa atau juga kaur pemerintahan sampai saat ini sudah berjalan dengan baik sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan *human relation* yang sudah berjalan semestinya. Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa seluruh aparatur desa telah berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dengan cukup baik. Namun demikian sering muncul persoalan – persoalan desa dan kemasyarakatan yang umum terjadi di masyarakat desa seperti kurangnya kepedulian masyarakat melaporkan warga baru di wilayah tersebut. Warga baru

terkadang tidak dilaporkan dan sekdes untuk dicatatkan dalam pendataan kependudukan merupakan salah satu contoh persoalan yang sampai saat ini perlu untuk dibenahi dalam sistem pemerintahan Desa Kalisari. Dalam tatanan kependudukan hal seperti itu dianggap persoalan sepele dan umum terjadi di desa. Namun demikian dengan perkembangan penduduk yang makin beragam dan sering terjadinya persoalan-persoalan baru di suatu wilayah, pencacatan penduduk baru dimanapun harus dilakukan selain sebagai bentuk tertib administrasi desa.

### **3.3 Solusi Mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan *Human Relations***

Dalam mengatasi persoalan-persoalan yang muncul di wilayah Desa Kalisari, maka langkah yang diambil oleh kepala desa sebagai penanggungjawab berjalannya pemerintah desa Kalisari adalah dengan selalu mengadakan koordinasi dan konsolidasi dengan jajaran di bawahnya. Dalam pelaksanaan tupoksi masing-masing petugas diberikan tambahan tugas sesuai dengan kemampuan yang ada dalam diri masing-masing.

Solusi yang telah dilaksanakan selama ini dirasakan sangat efektif untuk menjamin kelancaran pemerintah desa dan menjaga bentuk-bentuk transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Hasil akhir dan solusi yang telah diterapkan adalah pelayanan masyarakat semakin baik dan seluruh keluhan-keluhan masyarakat segera dapat teratasi sehingga tidak menjadi persoalan di kemudian hari.

## **4. PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *human relations* yang berlaku di Desa Kalisari Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan adalah terjalinnya hubungan yang cukup baik antara kepala desa dengan jajaran di bawahnya maupun jajaran dengan kepala desa dan juga hubungan antara kepala desa beserta jajarannya dengan masyarakat desa demikian juga sebaliknya.
2. Kendala dalam pelaksanaan *human relations* yang berlaku di Desa Kalisari Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan sampai saat ini adalah adanya perbedaan sumber daya manusia yang ada pada pegawai-pegawai dan atau petugas di desa tersebut. Kendala tersebut disebabkan faktor usia pada pegawai

yang sudah mendekati masa pensiun, sehingga kesulitan mengikuti perkembangan zaman dan tuntutan dan pemerintah pusat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

3. Solusi dalam mengatasi kendala-kendala yang terjadi adalah dengan melakukan koordinasi dan konsolidasi secara terus menerus untuk mengadakan pengawasan bersama-sama. Pengawasan dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi kesalahan-kesalahan yang sangat mungkin dilakukan oleh petugas desa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Effendy, Onong Uchjana. 2015. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily. 2005. *Kamus Inggris Indonesia An English – Indonesian Dictionaiy*. Jakarta: Gramedia.
- Hasan, Erliana. 2005. *Komunikasi Pemerintahan*. Bandung. Rifka Aditama.
- The Liang Gie, Unsur-unsur Administrasi, Penerbit Karya Kencana, Yogyakarta, 2000
- Tierney, Wiliam G dan James T Minor. 2004. *A Cultural Perspective on Communication and Governance*. Diakses pada 15 agustus 2016 ,dan <http://oregonstate.edu/senate/commiftees/other/jtfsg/Attachl4.NewDirection s2.2004.pdf>.
- Nasehudin, Toto Syatori dan Nanang Gozali. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014